

**MODEL KOLABORASI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN
BENCANA ALAM (STUDI KASUS: KOLABORASI
PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOREM
061/SURYAKENCANA)**Faisol Izuddin Karimi¹Agus Subagyo²Dadan Kurnia³^{1,2,3}, Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, IndonesiaEmail Koresponden : F1zuddin999@gmail.com**ABSTRACT**

This study stems from the complexity of disaster impacts, which necessitates cross-institutional collaboration capable of integrating organisational resources and capacities. The study aims to analyse the model of collaboration between the local government and Korem 061/Suryakencana in the management of natural disasters, as well as to identify the factors that support the effectiveness of this collaboration. This study employs a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews with informants from the local government, the Regional Disaster Management Agency (BPBD), and personnel from Korem 061/Suryakencana, supplemented by field observations and document analysis. Data analysis was conducted interactively through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research findings indicate that collaboration between the local government and Korem 061/Suryakencana takes place through structured coordination mechanisms, primarily via disaster coordination forums and emergency response command posts. The local government acts as the main coordinator, whilst the Military Command provides operational support such as the evacuation of victims, the distribution of logistics, and the construction of emergency facilities. These findings underscore the importance of synergy between civilian and military actors in strengthening disaster response capacity at the local level, as well as promoting the strengthening of cross-institutional coordination mechanisms in disaster management.

Keywords: collaborative governance, disaster management, Korem 061/Suryakencana, local government.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana alam tertinggi di dunia. Kondisi geografis yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana geologi maupun hidrometeorologi. Selain itu, karakteristik topografi yang didominasi oleh pegunungan, garis pantai yang panjang, serta perubahan iklim global semakin memperbesar potensi terjadinya bencana alam di berbagai daerah. Konteks tersebut menempatkan Indonesia dalam posisi yang memerlukan sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi dan responsif agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan secara efektif.

Data terbaru menunjukkan bahwa intensitas kejadian bencana di Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi sekitar 4.727 kejadian bencana di berbagai wilayah Indonesia, dengan dominasi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrem yang mencapai lebih dari 99% dari total kejadian bencana (Bencana, 2026). Banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi dengan lebih dari dua ribu kejadian dalam satu tahun, diikuti oleh kebakaran hutan dan lahan serta cuaca ekstrem. Dampak dari kejadian tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian material yang besar, tetapi juga memengaruhi kehidupan jutaan masyarakat yang terdampak maupun mengungsi akibat bencana tersebut.

Tingginya frekuensi kejadian bencana tersebut menegaskan bahwa penanganan bencana tidak dapat lagi dipandang sebagai tanggung jawab satu institusi semata. Kompleksitas dampak yang ditimbulkan menuntut adanya koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai aktor, baik

pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga nonpemerintah, maupun unsur masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan kolaboratif menjadi semakin penting untuk memastikan efektivitas penanganan bencana, khususnya pada fase tanggap darurat dan pemulihan. Kolaborasi antarorganisasi memungkinkan terjadinya integrasi sumber daya, pertukaran informasi, serta sinergi kapasitas kelembagaan dalam menghadapi situasi krisis.

Dalam praktiknya, pemerintah daerah memegang peranan strategis dalam manajemen bencana karena menjadi aktor yang paling dekat dengan wilayah terdampak. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing melalui koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun demikian, keterbatasan sumber daya, kapasitas organisasi, dan jangkauan operasional seringkali menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam merespons bencana secara cepat dan efektif. Oleh karena itu, dukungan dari institusi lain yang memiliki kapasitas operasional tinggi menjadi sangat krusial.

Salah satu aktor penting yang sering terlibat dalam operasi penanganan bencana di Indonesia adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peran militer dalam operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana merupakan bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang TNI. Dalam berbagai kejadian bencana, TNI sering kali menjadi salah satu institusi yang memiliki kemampuan mobilisasi sumber daya, logistik, serta personel yang relatif cepat. Kehadiran unsur militer dalam operasi tanggap darurat seringkali mempercepat proses evakuasi korban, distribusi bantuan, serta pemulihan infrastruktur yang terdampak.

Di tingkat wilayah, peran tersebut salah satunya diwujudkan melalui keterlibatan satuan komando kewilayahan seperti Komando Resor Militer (Korem). Korem memiliki struktur organisasi, jaringan teritorial, serta kapasitas personel yang memungkinkan pelaksanaan operasi bantuan kemanusiaan secara efektif di daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan satuan TNI, termasuk Korem 061/Suryakencana, menjadi praktik yang cukup menonjol dalam berbagai operasi penanganan bencana di wilayah Jawa Barat. Sinergi ini mencerminkan bagaimana hubungan sipil-militer dapat berkembang dalam kerangka kerja kolaboratif yang berorientasi pada kepentingan kemanusiaan dan keselamatan masyarakat.

Meskipun praktik kolaborasi antara pemerintah daerah dan unsur militer dalam penanganan bencana telah berlangsung secara luas, kajian akademik yang secara khusus mengkaji model kolaborasi tersebut masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian tentang manajemen bencana lebih banyak menyoroti aspek kelembagaan pemerintah, kapasitas masyarakat, atau sistem mitigasi bencana secara umum. Studi yang mengkaji secara mendalam dinamika kolaborasi antara aktor sipil dan militer, terutama dalam konteks tata kelola penanggulangan bencana di tingkat daerah, masih belum banyak dikembangkan dalam literatur administrasi publik maupun studi kebencanaan.

Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya celah pengetahuan yang penting untuk diisi, khususnya terkait dengan bagaimana pola koordinasi, mekanisme kerja sama, serta pembagian peran antara pemerintah daerah dan institusi militer terbentuk dalam praktik penanganan bencana. Analisis terhadap dinamika kolaborasi tersebut menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas respons bencana, termasuk aspek kepemimpinan, komunikasi antarorganisasi, integrasi sumber daya, serta kepercayaan antaraktor yang terlibat dalam proses penanganan bencana.

Lebih jauh lagi, pendekatan *collaborative governance* memberikan kerangka analitis yang relevan untuk memahami interaksi antara berbagai aktor dalam proses penanggulangan bencana. Konsep ini menekankan pentingnya kerja sama lintas institusi yang dibangun melalui proses dialog, pembagian tanggung jawab, serta komitmen bersama dalam mencapai tujuan publik (Ansell & Gash, 2008). Dalam konteks kebencanaan, model kolaborasi semacam ini memungkinkan terciptanya mekanisme koordinasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap situasi darurat yang bersifat kompleks dan dinamis.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis model kolaborasi antara pemerintah daerah dan Korem 061/Suryakencana dalam penanganan bencana alam, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung efektivitas kolaborasi tersebut. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai *collaborative governance* dalam konteks manajemen bencana serta hubungan sipil–militer dalam operasi kemanusiaan. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan mekanisme koordinasi lintas institusi dalam upaya meningkatkan kapasitas penanganan bencana di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika kolaborasi antara pemerintah daerah dan Korem 061/Suryakencana dalam penanganan bencana alam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali secara komprehensif proses interaksi antaraktor, mekanisme koordinasi kelembagaan, serta praktik kolaboratif yang terbentuk dalam konteks nyata penanggulangan bencana. Studi kasus digunakan untuk memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap fenomena

kolaborasi lintas institusi dalam suatu konteks spesifik, sehingga dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai pola hubungan, peran kelembagaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja sama antarorganisasi (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan sejumlah informan kunci yang terlibat secara langsung dalam proses penanganan bencana, antara lain pejabat pemerintah daerah, personel Korem 061/Suryakencana, serta unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pihak terkait lainnya yang berperan dalam operasi tanggap darurat.

Pengumpulan data juga dilengkapi dengan observasi lapangan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai mekanisme koordinasi dan pola interaksi antarorganisasi dalam proses penanganan bencana. Observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana praktik kolaborasi tersebut dijalankan dalam konteks operasional, termasuk pembagian peran, alur komunikasi, serta integrasi sumber daya antar lembaga yang terlibat. Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti, sekaligus memungkinkan proses triangulasi data guna meningkatkan keakuratan dan keabsahan informasi yang diperoleh (Miles et al., 2014).

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Selanjutnya, data yang telah terorganisasi disajikan dalam bentuk narasi analitis untuk memudahkan interpretasi terhadap dinamika kolaborasi yang terjadi. Untuk menjamin validitas temuan penelitian, dilakukan teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, serta konfirmasi kepada informan

(*member checking*) sehingga hasil analisis yang diperoleh memiliki tingkat keandalan dan kredibilitas yang memadai (Lincoln & Guba, 1985).

KERANGKA TEORI

1. Teori Collaborative Governance

Konsep *collaborative governance* berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas persoalan publik yang tidak lagi dapat diselesaikan oleh satu institusi secara mandiri. Dalam konteks administrasi publik modern, berbagai persoalan strategis seperti perubahan iklim, kemiskinan, maupun penanggulangan bencana membutuhkan keterlibatan berbagai aktor lintas sektor. *Collaborative governance* merujuk pada proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik yang melibatkan aktor pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sipil dalam suatu forum bersama yang bersifat deliberatif dan berbasis konsensus (Ansell & Gash, 2008). Melalui mekanisme ini, aktor-aktor yang memiliki kepentingan dan sumber daya berbeda dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan publik secara lebih efektif.

Ansell dan Gash menjelaskan bahwa *collaborative governance* merupakan suatu pengaturan institusional di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif. Model ini menekankan pentingnya dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses bersama, serta pemahaman kolektif terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), serta kepemimpinan fasilitatif yang mampu mengelola

dinamika interaksi antaraktor. Oleh karena itu, kerangka *collaborative governance* memberikan landasan konseptual untuk memahami bagaimana aktor-aktor tersebut dapat bekerja secara sinergis dalam menghadapi situasi darurat.

2. Teori Manajemen Bencana

Manajemen bencana merupakan suatu proses sistematis yang mencakup serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, merespons kejadian bencana, serta memulihkan kondisi pascabencana secara berkelanjutan. Secara konseptual, manajemen bencana tidak hanya berkaitan dengan tindakan tanggap darurat, tetapi juga mencakup kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan. Keempat tahapan tersebut dikenal sebagai *disaster management cycle*, yang menggambarkan bahwa penanggulangan bencana merupakan proses yang berlangsung secara berkelanjutan dan saling terkait (Coppola, 2015).

Dalam praktiknya, manajemen bencana modern menekankan pentingnya pendekatan *multi-actor governance*, yaitu keterlibatan berbagai institusi dalam proses penanggulangan bencana. Tidak hanya lembaga pemerintah, tetapi juga organisasi kemanusiaan, komunitas lokal, sektor swasta, serta institusi militer sering kali terlibat dalam proses tersebut. Kehadiran berbagai aktor tersebut mencerminkan bahwa penanganan bencana merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan integrasi sumber daya, kapasitas organisasi, serta jaringan koordinasi yang efektif (Tierney, 2014).

PEMBAHASAN

1. Dinamika Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Korem 061/Suryakencana dalam Penanganan Bencana

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan Korem 061/Suryakencana dalam penanganan bencana alam berlangsung melalui mekanisme koordinasi lintas lembaga yang relatif terstruktur. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan dari unsur pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta personel Korem, keterlibatan unsur militer umumnya dimulai pada fase tanggap darurat ketika kapasitas pemerintah daerah memerlukan dukungan tambahan, terutama dalam aspek mobilisasi personel, logistik, dan distribusi bantuan. Dalam kondisi darurat tersebut, Korem berperan sebagai kekuatan pendukung yang memiliki kemampuan operasional cepat untuk membantu proses evakuasi korban, pembangunan fasilitas darurat, serta distribusi bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses kolaborasi tersebut tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga didukung oleh mekanisme koordinasi yang telah dibangun sebelumnya melalui forum koordinasi penanggulangan bencana di tingkat daerah. Beberapa informan dari pemerintah daerah menyampaikan bahwa komunikasi antara BPBD dan unsur TNI terjalin secara intensif, terutama melalui jaringan komando kewilayahan yang memungkinkan respons cepat terhadap situasi darurat. Salah satu informan dari BPBD menyatakan bahwa keberadaan satuan teritorial TNI hingga tingkat kecamatan memberikan kemudahan dalam proses mobilisasi bantuan serta pengumpulan informasi mengenai kondisi wilayah terdampak.

Selain itu, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan Korem 061/Suryakencana mencerminkan adanya pembagian peran yang relatif jelas dalam

operasi penanganan bencana. Pemerintah daerah melalui BPBD berperan sebagai koordinator utama dalam penanganan bencana, termasuk dalam perencanaan operasi tanggap darurat serta pengelolaan bantuan kemanusiaan. Sementara itu, Korem berperan dalam mendukung aspek operasional di lapangan, seperti evakuasi korban, pembangunan dapur umum, distribusi logistik, serta pengamanan wilayah terdampak. Pembagian peran tersebut memungkinkan terciptanya sinergi antar lembaga dalam menghadapi situasi bencana yang membutuhkan respons cepat dan terkoordinasi.

Temuan penelitian juga mengungkap bahwa keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Korem 061/Suryakencana sangat dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme koordinasi yang dibangun dalam proses penanganan bencana. Berdasarkan hasil wawancara, koordinasi antar lembaga umumnya dilakukan melalui pos komando tanggap darurat yang menjadi pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana di tingkat daerah. Pos komando tersebut berfungsi sebagai ruang koordinasi bersama bagi berbagai institusi yang terlibat, termasuk pemerintah daerah, TNI, kepolisian, relawan, serta organisasi kemanusiaan.

Dalam praktiknya, pos komando ini menjadi titik temu bagi berbagai aktor untuk berbagi informasi mengenai kondisi lapangan, kebutuhan logistik, serta perkembangan situasi bencana. Kehadiran unsur TNI dalam struktur komando tanggap darurat memungkinkan percepatan proses pengambilan keputusan operasional, terutama yang berkaitan dengan mobilisasi personel dan distribusi bantuan. Beberapa informan menekankan bahwa sistem komando yang dimiliki oleh TNI memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga efektivitas koordinasi di lapangan, khususnya dalam situasi darurat

yang membutuhkan respons cepat dan disiplin operasional yang tinggi. Untuk memberikan gambaran mengenai pembagian peran dalam kolaborasi tersebut, hasil penelitian dapat dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 1. Pembagian Peran dalam Penanganan Bencana

Aktor	Peran Utama	Bentuk Kegiatan
Pemerintah Daerah / BPBD	Koordinator penanganan bencana	Perencanaan tanggap darurat, pengelolaan bantuan, koordinasi lintas lembaga
Korem 061/Suryakencana	Dukungan operasional	Evakuasi korban, distribusi logistik, pembangunan fasilitas darurat
Kepolisian	Pengamanan wilayah	Pengaturan lalu lintas, pengamanan distribusi bantuan
Relawan dan masyarakat	Dukungan sosial	Penyaluran bantuan, layanan kemanusiaan

Sumber : Diolah Peneliti, 2025

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak hanya melibatkan satu institusi, melainkan merupakan hasil kerja kolektif berbagai aktor yang saling melengkapi dalam menjalankan fungsi masing-masing.

Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi efektivitas kolaborasi antara pemerintah daerah dan Korem 061/Suryakencana dalam penanganan bencana. Salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan kolaborasi adalah adanya kepercayaan antar lembaga yang telah terbangun melalui pengalaman kerja sama sebelumnya. Informan dari unsur pemerintah daerah menyampaikan bahwa hubungan koordinasi dengan TNI telah terjalin dalam berbagai kegiatan, baik dalam penanganan bencana maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Hubungan tersebut menciptakan tingkat kepercayaan yang mempermudah proses koordinasi ketika terjadi bencana.

Faktor pendukung lainnya adalah kapasitas organisasi yang dimiliki oleh TNI, khususnya dalam hal mobilisasi sumber daya dan

sistem komando operasional. Struktur organisasi militer yang bersifat hierarkis memungkinkan proses pengambilan keputusan berlangsung secara cepat, sehingga dukungan operasional dapat segera diberikan kepada pemerintah daerah. Selain itu, keberadaan jaringan teritorial hingga tingkat desa juga memungkinkan pengumpulan informasi mengenai kondisi wilayah terdampak secara lebih cepat dan akurat.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam proses kolaborasi tersebut. Salah satu kendala yang sering muncul adalah perbedaan prosedur birokrasi antara institusi sipil dan militer dalam pelaksanaan operasi penanganan bencana. Dalam beberapa situasi, proses administrasi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terkadang memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan mekanisme komando yang diterapkan dalam organisasi militer. Perbedaan karakteristik kelembagaan tersebut dapat mempengaruhi kecepatan koordinasi apabila tidak dikelola secara efektif.

2. Analisis Model Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Korem 061/Suryakencana dalam Penanganan Bencana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan Korem 061/Suryakencana dalam penanganan bencana alam tidak hanya berlangsung dalam bentuk koordinasi operasional, tetapi juga mencerminkan suatu pola tata kelola kolaboratif yang relatif terstruktur. Model kolaborasi yang teridentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan adanya integrasi peran antara aktor sipil dan militer yang didasarkan pada pembagian fungsi kelembagaan, mekanisme koordinasi yang jelas, serta tujuan bersama dalam upaya penyelamatan masyarakat terdampak

bencana. Kolaborasi tersebut berlangsung melalui forum koordinasi kebencanaan, pembentukan pos komando tanggap darurat, serta mobilisasi sumber daya lintas institusi yang memungkinkan respons yang lebih cepat dan terorganisir dalam situasi krisis.

Jika dianalisis menggunakan kerangka *collaborative governance*, pola kolaborasi yang terjadi menunjukkan adanya beberapa elemen penting yang mendukung keberhasilan kerja sama antar lembaga. Pertama, keberadaan forum koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, BPBD, TNI, kepolisian, dan unsur masyarakat mencerminkan adanya mekanisme deliberatif yang memungkinkan pertukaran informasi dan penyelarasan kebijakan. Kedua, hubungan kerja sama yang telah terbangun sebelumnya menciptakan tingkat kepercayaan antar lembaga yang mempermudah proses koordinasi ketika terjadi bencana. Ansell dan Gash (2008) menekankan bahwa kepercayaan merupakan elemen kunci dalam proses *collaborative governance* karena dapat memperkuat komitmen para aktor untuk terlibat secara aktif dalam proses kolaborasi.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan dan kepemimpinan operasional yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Pemerintah daerah melalui BPBD berperan sebagai koordinator utama yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kebijakan dan sumber daya penanggulangan bencana, sementara Korem 061/Suryakencana memberikan dukungan dalam aspek mobilisasi personel, distribusi logistik, serta pelaksanaan operasi di lapangan. Pembagian peran tersebut menunjukkan adanya integrasi kapasitas antara institusi sipil dan militer dalam menghadapi situasi darurat. Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012)

menjelaskan bahwa kapasitas tindakan bersama (capacity for joint action) merupakan faktor penting dalam collaborative governance karena menentukan kemampuan aktor-aktor yang terlibat untuk mengimplementasikan keputusan secara efektif.

Dari perspektif manajemen bencana, model kolaborasi yang ditemukan dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya keterkaitan erat dengan prinsip multi-actor disaster management, di mana berbagai lembaga bekerja secara kolektif untuk mengurangi dampak bencana. Keterlibatan Korem 061/Suryakencana dalam operasi tanggap darurat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kapasitas respons pemerintah daerah, terutama dalam situasi yang membutuhkan mobilisasi sumber daya secara cepat. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen bencana sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga-lembaga yang terlibat untuk membangun jaringan koordinasi yang efektif serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal (Kapucu & Garayev, 2011).

Lebih jauh lagi, model kolaborasi yang teridentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah daerah dan institusi militer dapat berkembang dalam kerangka kemitraan strategis yang berorientasi pada kepentingan kemanusiaan. Dalam situasi bencana, batas-batas kelembagaan antara aktor sipil dan militer menjadi lebih fleksibel karena fokus utama diarahkan pada upaya penyelamatan korban serta pemulihan kondisi wilayah terdampak. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana hubungan sipil–militer dapat bertransformasi menjadi bentuk kerja sama yang konstruktif dalam konteks tata kelola kebencanaan. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Waugh bahwa kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan militer, dapat meningkatkan efektivitas

respons terhadap bencana apabila didukung oleh mekanisme koordinasi yang jelas dan kepemimpinan yang adaptif (Waugh & Streib, 2006).

Dari temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian mengenai *collaborative governance* dalam manajemen bencana di tingkat daerah. Sebagian besar studi sebelumnya lebih banyak menyoroti peran pemerintah pusat atau lembaga nasional dalam koordinasi penanggulangan bencana, sementara dinamika kolaborasi di tingkat lokal masih relatif kurang mendapat perhatian. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan bencana di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah untuk membangun jaringan kolaborasi dengan berbagai aktor strategis, termasuk institusi militer yang memiliki kapasitas operasional yang kuat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif, ditemukan bahwa penanganan bencana tidak dapat dilaksanakan secara efektif oleh satu institusi saja, melainkan memerlukan sinergi lintas lembaga yang mampu mengintegrasikan sumber daya, kapasitas organisasi, serta jaringan koordinasi yang kuat. Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan Korem 061/Suryakencana berlangsung melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur, terutama melalui pembentukan pos komando tanggap darurat serta forum koordinasi penanggulangan bencana di tingkat daerah. Dalam mekanisme tersebut, pemerintah daerah melalui BPBD berperan sebagai koordinator utama dalam pengelolaan kebijakan dan operasi penanggulangan bencana, sementara Korem berperan sebagai kekuatan pendukung yang memberikan dukungan operasional di lapangan,

seperti evakuasi korban, distribusi logistik, pembangunan fasilitas darurat, serta pengamanan wilayah terdampak. Pembagian peran yang jelas ini memungkinkan terciptanya integrasi kapasitas antar lembaga dalam merespons situasi darurat secara cepat dan terkoordinasi.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan kebijakan penanggulangan bencana di tingkat daerah. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat mekanisme koordinasi lintas lembaga melalui pembentukan forum kolaboratif yang lebih sistematis, peningkatan kapasitas kelembagaan dalam manajemen bencana, serta pengembangan prosedur kerja sama yang lebih adaptif antara institusi sipil dan militer. Selain itu, diperlukan upaya untuk memperkuat integrasi perencanaan penanggulangan bencana dengan sistem komando operasional yang dimiliki oleh TNI agar proses mobilisasi sumber daya dalam situasi darurat dapat berlangsung secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bencana, B. N. P. (2026). *Data dan Informasi Bencana Indonesia Tahun 2025*. BNPB.
- Coppola, D. P. (2015). *Introduction to International Disaster Management* (3rd ed.). Butterworth-Heinemann.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Kapucu, N., & Garayev, V. (2011). Collaborative decision-making in emergency and disaster management. *International Journal of Public Administration*, 34(6), 366–375. <https://doi.org/10.1080/01900692.2011.561477>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Tierney, K. (2014). *The Social Roots of Risk: Producing Disasters, Promoting Resilience*. Stanford University Press.
- Waugh, W. L., & Streib, G. (2006). Collaboration and leadership for effective emergency management. *Public Administration Review*, 66(s1), 131–140. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00673.x>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Sage Publications.